



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUBHAN MUGHNI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 851203

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.495.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 161.000.000
4. Tanah Seluas 1.625 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 568.750.000
5. Tanah Seluas 1.416 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 212.400.000
6. Tanah Seluas 621 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 93.150.000
7. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/101 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **16.750.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.



16.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 88.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 150.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 34.472.514

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.784.522.514

III. HUTANG

Rp. 450.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.334.522.514

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.